

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

Implikasi Dana ALokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Oleh:

Rita handayani

Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : ritahandayani@umsu.ac.id

ABSTRACT

The main objective of this research is to empirically examine the implications of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds on Economic Growth and the Human Development Index. Estimating the model to see the short-term and long-term impact of the model being developed. Using quantitative descriptive secondary data with Panel Vector Autoregressive (PVAR)/PVECM Panel Vector Error Correction Model analysis techniques on time series data from 33 city districts in North Sumatra during the 2021-2022 period. The research results show that the variable general allocation funds (DAU) has a positive short-term relationship with the human development index variable (HDI), while the variables special allocation funds (DAK) and profit sharing funds (DBH) have a negative relationship and are not significant in the short term. economic growth (PE) and human development index (HDI) variables. The results of the VECM model in Estimates of long-term positive causality (long-run causality) occur in the economic growth (PE) and human development index (HDI) variables. It can be simplified that in the long term, an increase in economic growth will increase the Human Development Index..

Keyword : General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Economic Growth, Human Development Index

PENDAHULUAN

Krisis finansial pada 1997, menjadi awal tonggak yang melatarbelakangi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang bersifat big-bang dan asimetris (Shah dan Chaudhry, 2004; Firman, 2008). Sejak pelaksanaan disentralisasi fiskal selama dua dekade telah terjadi perubahan secara signifikan pada proses layanan publik. Kebijakan disentralisasi tidak hanya terjadi pada politik, administrasi ekonomi, tetapi juga perpindahan kompetensi, kemampuan dan tanggung jawab dari pusat kedaerah yang lebih baik termasuk pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya (Kharisma, 2013). Desentralisasi merupakan wujud pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri, pengalokasian transfer dari Pemerintah Pusat dan lainnya (Sidik, 2002 dalam Kharisma, 2013). Pembagian kewenangan tersebut turut mengatur dan mengurus pemerintahannya juga penyediaan pelayanan kepada masyarakat disertai dengan penyerahan kewenangan pada memanfaatkan dan mengalokasikan keuangan, antara lain dalam hal pungutan pajak dan retribusi (tax assignment), pengalokasian bagi hasil, penerimaan (revenue sharing), dan transfer keuangan (grant).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

Desentralisasi fiskal secara teoritis memiliki implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta efisiensi (Maulana,2019). Sebagai strategi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dalam membangun keselarasan hubungan antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Tetapi bagi beberapa daerah-daerah pasca pemekaran, implikasi tersebut belum seluruhnya teruji. Pada sisi yang lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah beberapa tujuan pemekaran daerah. Struktur anggaran pendapatan APBD Sumatera utara tahun 2022. Dari 12 Triliun total pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera utara, 4,4 % berasal dari DBH (dana bagi hasil), 19,5% DAU (dana alokasi umum), 2,4 persen DAK (dana alokasi khusus) fisik dan 14,4% pada DAK dana alokasi khusus non fisik.

Gambar 1.1 Struktur Anggaran APBD Sumatera Utara



Sumber: publikasi, sumutprov.go.id

Tabel. Kondisi makro ekonomi disumatera Utara

No	Kondisi makro ekonomi	2021	2022
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2.61 %	4,73 %
2.	Indeks Pembangunan Manusia	72 %	72,71 %

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional (BPS)

Perjalanan disentralisasi fiskal pada provinsi Sumatera Utara juga telah banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat. Pemekaran wilayah yang telah berjalan menjadikan Sumatra Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota madya 325 kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa dengan total jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Secara umum kondisi makro ekonomi disumatera utara seperti terlihat pada tabel, laju pertumbuhan ekonomi ditahun 2022 sebesar 4.73 % atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 2.61%. Sementara indeks pembangunan manusia yang menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan selama periode yang sama hanya naik 0,71 persen. Pemekaran wilayah sudah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mesyarakat yag tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga pengentaskan kemiskinan pada kabupaten/kota diSumatera Utara.

Tujuan utama penelitian ini adalah menelaah secara empiris implikasi jangka pendek dan jangka Panjang dari kebijakan fiskal pada penyaluran dana DAU, DAK dan DBH yang dilakukan pemerintah pusat pada 33 kabupaten/ kota diSumatera Utara, wujud dari pelaksanaan desentralisasi serta melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM)

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

KAJIAN TEORI

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah (fungsi publik) dari pemerintah kepada daerah (bawahan) atau organisasi semi-mandiri instansi vertikal atau kepada pihak swasta. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, Livack and Seddon (1999). Terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya, Khusaini (2006). Desentralisasi dapat dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan menginformasikan kepada masyarakat daerah untuk menggalang partisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah.

Oentarto S.M (2004), membatasi pengertian desentralisasi sebagai kebijakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada unit pemerintah bawahan. Secara politis, desentralisasi merupakan kebijakan berbagi kewenangan (power sharing) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Implikasinya, sejauh mana kekuasaan dan kewenangan didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan menurut besaran atau luas geografis suatu negara. Selain itu, desentralisasi juga berarti pembentukan wilayah-wilayah yang lebih kecil dari wilayah negara dan penciptaan lembaga-lembaga, baik bersifat otonom maupun administratif di wilayah-wilayah tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat, Azimi (2020). Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut, daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal. Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya melalui komponen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Urip dan Indahyani (2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam pemenuhan berbagai barang ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena adanya kemajuan teknologi, institusional dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Teori pertumbuhan ekonomi klasik Terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan output total, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok modal. 2. Pertumbuhan penduduk. Tingkat upah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik (Solow-Swan) penekankan pertumbuhan ekonomi pada peningkatan capital, labor, idea, dan teknologi. Semakin meningkat jumlah capital, semakin terdidik dan professional tenaga kerja, berkembang idea dan temuan-temuan dan juga perkembangan teknologi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) merupakan alat yang digunakan untuk menggolongkan atau membedakan apakah suatu negara maju, berkembang, atau terbelakang. IPM digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan manusia dan mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dengan terpenuhinya fasilitas umum, masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usaha secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya menciptakan kehidupan yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat. Kualitas hasil pembangunan ekonomi dapat dilihat menggunakan IPM dengan indeks komposit berdasarkan tiga indikator: (a) kesehatan, (b) tingkat pendidikan, dan (c) standar hidup (Sayifullah & Gandasari, 2016), angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. IPM dapat dikategorikan

- 1) Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
- 2) Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
- 3) Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$). Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM > 80$).
- 4) Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM > 80$)

Literatur Riview

Eko agung wibowo (2022), meneliti bukti empiris dampak dari desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan pada 476 kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2010-2018. Menggunakan data panel dengan fixed effect model menunjukkan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota secara nasional, Kawasan Barat Indonesia (KBI), maupun daerah perkotaan. Hasil penelitian merekomendasikan penyusunan kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat pro-poor melalui penguatan kapasitas keuangan daerah, baik optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD), pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, peningkatan kualitas belanja dan tata kelola keuangan daerah, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Maulana Mukhlis (2019), mengkaji implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran dengan fokus di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji, dengan pendekatan deskriptif atau analisa kualitatif berdasarkan data trend statistik. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran dilakukan, jumlah transfer dana perimbangan maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupaten pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, desentralisasi fiskal telah berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran, tapi ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah khususnya pada sisi makro-ekonomi dan kesehatan fiskal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif data sekunder menggunakan teknik analisis *Panel Vector Autoregressive (PVAR)/PVECM Panel Vector Error Correction Model* pada data time series 33 kabupaten kota di Sumatera utara selama periode 2021-2022. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pada pertumbuhan ekonomi, dan indeks pebangunan manusia pada di sumatera

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data antar tempat (cross section) yang diambil dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, dan data antar waktunya (time series) diambil dari tahun 2021 – 2022. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS) Indonesia, publikasi Pemprov Sumatera Utara serta sumber – sumber lainnya yang mendukung.

Teknik pengujian kualitas data dan permodelan

PVAR/ PVECM digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel deret waktu dan untuk menganalisis dampaknya dinamis antar variabel, menganalisis kausalitas antara variabel diasumsikan sebagai variabel respon atau variabel yang mempengaruhi. Menggunakan model *VAR* dalam data panel, maka akan membantu menganalisis data time series dan juga bisa dipadukan dengan data *cross section* (Koondhar et al., 2021). Tahapan awal dimulai dengan uji stasioner dan uji kointegrasi. Ketika data nonstasioner dan memiliki kointegrasi maka analisis data yang dilakukan adalah uji *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM). Uji ini dimulai secara sistematis dengan uji akar unit (stasioneritas data), determinasi panjang lag optimal, uji stabilitas, uji Kointegrasi, estimasi persamaan *PVAR/PVECM*, uji kausalitas, *Impulse Respon Function* dan *Variance Decomposition* (Gujarati, 2023). Estimasi persamaan *PVAR/ PVECM* dapat dihitung dengan menggunakan uji kausalitas *Toda-Yamamoto* yang persamaannya adalah sebagai berikut (Zhou, 2018)

$$\Delta DAU_{it} = \alpha_0 + \sum_j^n \beta_{1j} \Delta DAU_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DAK_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DBH_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta PE_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta IPM_{i,t-j} + \gamma e_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

$$\Delta DAK_{it} = \alpha_0 + \sum_j^n \beta_{1j} \Delta DAU_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DAK_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DBH_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta PE_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta IPM_{i,t-j} + \gamma e_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

$$\Delta DBH_{it} = \alpha_0 + \sum_j^n \beta_{1j} \Delta DAU_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DAK_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DBH_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta PE_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta IPM_{i,t-j} + \gamma e_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

$$\Delta PE_{it} = \alpha_0 + \sum_j^n \beta_{1j} \Delta DAU_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DAK_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DBH_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta PE_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta IPM_{i,t-j} + \gamma e_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

$$\Delta IPM_{it} = \alpha_0 + \sum_j^n \beta_{1j} \Delta DAU_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DAK_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{3j} \Delta DBH_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta PE_{i,t-j} + \sum_j^n \beta_{2j} \Delta IPM_{i,t-j} + \gamma e_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \quad (3.5)$$

Keterangan:

- DAU_{it} : Variabel Dana Alokasi Umum
- DAK_{it} : Variabel Dana Alokasi Khusus
- DBH_{it} : Variabel Dana Bagi Hasil
- PE_{it} : Variabel pertumbuhan ekonomi
- IPM_{it} : Variabel Indeks Pembangunan manusia

i: Kabupaten/ kota, *t* : tahun, β : Konstanta, ε : *stochastic error term*

i: 33 Kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian dan Analisis

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

Langkah pertama membangun model *Panel Vector Autoregressive (PVAR)/PVECM Panel Vector Error Correction Model* adalah dengan melakukan uji stasioner untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang stasioner. Pada penelitian ke5 variabel data stasioner pada First different dan 1 variabel yaitu DBH stasioner pada level. Selanjutnya Uji lag optimum berada pada lag 2 untuk semua jenis criteria. Untuk menentukan lag optimum dapat dilihat pada nilai AIC yang memiliki nilai terkecil 134.2844*. Roots of Characteristic Polynomial sebagai uji stabiitas menunjukkan nilai modulus kurang dari satu menunjukkan bahwa data stabil dan model VAR / VECM dapat dilakukan.

Uji kausalitas Granger

Kausalitas adalah hubungan sebab akibat suatu hal, hal ini dapat kita sederhanakan bahwa bahwa hubungan sebab akibat terjadi antar variable. Uji kausalitas Granger dilakukan dengan membandingkan nilai Prob lebih kecil dari 0.05 diartikan bahwa antar variable memiliki hubungan kausalitas, hasil nilai Prob menunjukkan

1. Variabel DAU memiliki memiliki hubungan kausalitas dengan variabel DBH dengan nilai prob 0.04.
DAU= DBH (Dana alokasi umum memberikan sebab/ akibat pada dana bagi hasil)
2. Variable PE memiliki memiliki hubungan kausalitas dengan Variabel IPM dengan nilai prob 0.05 dan
PE= IPM (pertumbuhan ekonomi memberikan sebab/ akibat pada Indeks Pembangunan manusia)
3. Variabel IPM memiliki memiliki hubungan kausalitas dengan variabel PE dengan nilai prob 0.02.
IPM= PE (Indeks Pembangunan manusia memberikan sebab/ akibat pada pertumbuhan ekonomi)

Variable IPM dan PE memiliki hubungan kausalitas timbal balik atau dua arah, artinya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada Indeks Pembangunan manusia di Sumatera Utara begitu juga sebaliknya Indeks Pembangunan manusia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Uji Kointegrasi Johansen

Uji Kointegrasi Johansen menghasilkan 4 persamaan kointegrasi yang terbentuk, maka model VECM dipilih sebagai model estimasi yang digunakan.

Uji VECM jangka panjang

VECM Estimates hubungan jangka panjang dapat dilihat variable yang memiliki kausalitas positif jangka panjang (long-run causality) adalah variable PE [4.70], IPM [1.64]. Hal ini dapat disederhanakan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan dari pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Uji VECM jangka pendek

Hubungan jangka pendek dapat dilihat pada tabel Vector Error Correction Estimates, dengan membandingkan t-statistik dan t-tabel. Nilai t-statistik > t-tabel maka dikatakan variable dipengaruhi. Nilai t-tabel n 60 = 1,6796, Dengan nilai R - square tertinggi pada variable PE 0.740988. Hubungan jangka pendek pada lag 2 terjadi pada Variabel

1. Variable DAU memiliki hubungan jangka pendek positif dengan variable DAU, DAK, dan IPM.
2. Variable DAK memiliki hubungan jangka pendek positif dengan variable DAK, dan DBH
3. Variable DBH memiliki hubungan jangka pendek positif dengan variable DAU
4. Variable IPM tidak memiliki hubungan jangka pendek positif dengan variable lain

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

5. Variable PE tidak memiliki hubungan jangka pendek positif dengan lain

Uji Impulse Response Function (IRF)

Analisis Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk melihat respon suatu variabel ketika ada shock atau guncangan pada suatu variable.

1. Variable DAU terlihat menunjukkan kondisi guncangan/shock tidak berfluktuatif pada periode tahun ke2 dan stabil pada periode ke 4.
2. Variabel DAK terlihat menunjukkan pengaruh guncangan/shock berfluktuasi pada periode tahun ke2 dan stabil pada periode ke 4.
3. Variabel DBH terlihat menunjukkan kondisi guncangan/shock tidak berfluktuatif pada periode tahun ke2, dan stabil pada periode ke 4.
4. Variabel IPM terlihat menunjukkan kondisi guncangan/shock tidak berfluktuatif pada periode tahun ke2 dan stabil pada periode ke 4.
5. Variable KM terlihat menunjukkan kondisi guncangan/shock yang terlihat tidak berfluktuatif pada periode tahun ke2 dan stabil pada periode ke 4.
6. Variable PE terlihat menunjukkan kondisi guncangan/shock yang berfluktuasi kembali stabil pada periode tahun ke4 dan stabil pada periode ke 4.

PEMBAHASAN

Hasil Model Panel VECM menunjukkan bahwa variable DAU, DAK dan DBH memiliki kausalitas negative signifikan terhadap variable Pertumbuhan Ekonomi dan IPM. Hal ini sama seperti yang diteliti oleh *Eko agung wibowo (2022)* pada 476 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2010-2018, menemukan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota secara nasional pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). *Rasbin (2016)* pada 33 provinsi 2009 – 2013 di Indonesia, menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi tapi tidak signifikan, hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat. *Brian Jordi (2022)*, di Kalimantan Timur 2014- 2022, menemukan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Desentralisasi merupakan wujud pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri. Pengalokasian transfer dari Pemerintah Pusat serta pengelolaan terkait kebutuhan daerah dan lainnya. Sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada unit pemerintah bawahan desentralisasi fiskal secara politis merupakan kebijakan berbagi kewenangan pusat kepada daerah baik bersifat otonom maupun administrative. Sehingga sudah seharusnya desentralisasi fiskal pada alokasi dana DAU, DAK dan DBH memiliki implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM serta pemerataan pembangunan yang efisiensi. Selanjutnya hasil model panel VECM terjadi kausalitas positif jangka panjang (long-run causality) pada variable pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat disederhanakan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan dari pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.

Kebijakan desentralisasi fiskal pada dana DAU, DAK dan DBH di Sumatera Utara tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pertumbuhan Ekonomi serta IPM dalam jangka Panjang. Peningkatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan agar kebijakan disentrasasi fiskal dimasa depan akan lebih tepat sasaran. Sehingga kemungkinan terjadi kebocoran atau praktik korupsi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dapat

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

dihindari. Serta pemerataan Pembangunan pada 33 kabupaten/ kota di Sumatera Utara dapat terus terlaksana

KESIMPULAN

Kebijakan desentralisasi fiskal yaitu Variable Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan jangka pendek positif dan signifikan dengan variable indeks Pembangunan manusia (IPM), sementara variable Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dalam jangka pendek terhadap variable pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks Pembangunan manusia (IPM) pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kebijakan desentralisasi fiskal yaitu Variable Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki hubungan kausalitas positif jangka panjang (long-run causality) terhadap Variable pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks Pembangunan manusia (IPM). Sementara variable yang memiliki hubungan kausalitas positif jangka panjang (long-run causality) adalah variabel pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap indeks Pembangunan manusia (IPM) pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansofino, dkk. (2016a). *Buku Ajar Ekonometrika*. Deepublish.
- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi 2010, Cetakan Keempatbelas*. Rineka Cipta.
- Benandri, A. N. E., & Andayani. (2018). Pengaruh Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Risiko Keuangan Terhadap Income Smoothing. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/188>
- Devina Ramadhani, Ati Sumiati, & Dwi Handarini. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 579–599.
<https://doi.org/10.21009/japa.0203.06>
- Dewi, M. Y., & Sujana, I. K. (2014). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas pada praktik perataan laba dengan jenis industri sebagai variabel pemoderasi di bursa efek indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(2), 170–184.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8041>
- Ginantra, K. G., & Putra, N. W. A. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Dividend Payout Ratio Dan Net Profit Margin Pada Perataan Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 602–617.
- Hadi, S., & Idrus, F. (2021). *Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Jasa Subsektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. 1(1)*, 168–176.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/lucrum/index>
- Herianti, E., & Suryani, A. (2016). Pengaruh Kualitas Auditor, Audit Delay Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 1(1), 416–425.
- Heriston Sianturi, & Wafa Eka Yani Rosita. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Liabilitas*, 2(2), 65–80.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v2i2.26>
- Kasmir. (2019). *Laporan Keuangan*.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 1 2024 hal 17 -25

- Marpaung, C. O., & Latrini, N. M. Y. (2014). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial pada Perataan Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 279–289.
- MM., A. J., & Farina, K. (2017). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Dan Kualitas Audit Terhadap Perataan Laba. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 5(1).
<https://doi.org/10.35137/jmbk.v5i1.81>
- Natalia, M., -, M., & -, D. (2018). Kualitas Audit dan Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 170–179.
<https://doi.org/10.28932/jam.v9i2.485>
- Nugraha, P., & Dillak, Julianti, V. (2018). Profitabilitas, Leverage & Ukuran Perusahaan Terhadap Peralatan Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 10*(No. 1), 42–48.
- Oktaviasari, T., Miqdad, M., & Effendi, R. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7742>
- Panggabean, M. R. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26(1), 82–94.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v26i1.266>
- Prasetya, H. (2013). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, Klasifikasi KAP dan Likuiditas Terhadap Praktik Perataan Laba. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 1–65.
- Ratnasari, D., Suriyanti, L. H., & Azmi, Z. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1(1), 108–121.
- Setyaningsih, T., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Income Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i1.1468>
- Wicaksono, F. A., Kristiyanti, L., & Rukmini. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Financial Leverage terhadap Tindakan Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 1–8.